



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



PRINSIP “JANCUKAN” DALAM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Akhmad Riduwan, Andayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jl. Menur Pumpungan No.30, Surabaya 60118

Surel: akhmadriduwan@stiesia.ac.id

Volume 10
Nomor 2
Halaman 379-398
Malang, Agustus 2019
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
16 Januari 2019
Tanggal Revisi:
10 Agustus 2019
Tanggal Diterima:
31 Agustus 2019

Kata kunci:

angka,
pelaporan,
pengukuran



Abstrak: Prinsip “Jancukan” dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Penelitian ini bertujuan menelaah kemungkinan peningkatan keterbacaan dan keterpahaman laporan keuangan melalui kerangka konseptual pelaporan keuangan dan turunannya. Metode analisis isi diterapkan pada Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Laporan Keuangan Emiten, dan hasilnya dijustifikasi dengan terminologi “jancuk” sebagai refleksi. Hasil analisis menunjukkan laporan keuangan seharusnya tidak hanya merepresentasikan fenomena ekonomi dengan “angka”, tetapi perlu memberikan deskripsi melalui ungkapan “kata-kata” untuk meningkatkan pemahaman pengguna. Dengan istilah *Suroboyoon*, laporan keuangan harus disajikan berdasarkan prinsip “Jancukan.” Artinya, akuntan wajib berprinsip “JANGAn CUKUp (berhenti di) ANGka”; atau “JANGAn (merasa) CUKUp (menyajikan) ANGka.”

Abstract: The “Jancukan” Principle in Accounting and Financial Reporting. This study aims to examine the possibility of increasing the keterbacaan and keterpahaman of financial statements through the conceptual framework of financial reporting and its derivatives. The analisis isi method is applied to the conceptual framework, financial accounting standards, financial reporting, and the results are justified by the term “jancuk” as reflection. The analysis shows that financial reporting should not only represent economic phenomena with “number,” but also need to describe the expression “words” to increase users understanding. With the term *Suroboyoon*, financial reporting must be presented based on the “Jancukan” (“Don’t stop enough numbers” or “don’t present numbers enough”).

Mengutip ini sebagai: Riduwan, A., & Andayani. (2019). Prinsip “Jancukan” dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 379-398. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10022>

Laporan keuangan seharusnya mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna karena targetnya adalah memberikan dasar yang tepat bagi pengguna untuk mengambil keputusan ekonomi berdasarkan informasi keuangan yang diperlukan (Chakrabarty, Seetharaman, Swanson, & Wang, 2018; Fakhfakh, 2016; Havemo, 2018; Merkl-Davies & Brennan, 2017). Fakta bahwa laporan keuangan mengandung problema komunikasi sebenarnya sudah lama ditemukan secara empiris oleh Brennan & Merkl-Davies (2014) dan Rutherford (2016). Frezatti, Carter, & Barroso (2014) memperoleh bukti bahwa tingkat pemahaman dan kemampuan pemaknaan terhadap istilah teknis dan simbol-simbol bahasa akuntansi oleh penyedia ataupun pengguna laporan keuangan relatif rendah. Temuan tersebut diakui oleh Sandell & Svensson (2017) bahwa angka serta pengelompokan akuntansi sangat beragam, khususnya pada aspek penafsiran laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebermanfaatan laporan keuangan bagi

Laporan keuangan seharusnya mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna karena targetnya adalah memberikan dasar yang tepat bagi pengguna untuk mengambil keputusan ekonomi berdasarkan informasi keuangan yang diperlukan (Chakrabarty, Seetharaman, Swanson, & Wang, 2018; Fakhfakh, 2016; Havemo, 2018; Merkl-Davies & Brennan, 2017). Fakta bahwa laporan keuangan mengandung problema komunikasi sebenarnya sudah lama ditemukan secara empiris oleh Brennan & Merkl-Davies (2014) dan Rutherford (2016). Frezatti, Carter, & Barroso (2014) memperoleh bukti bahwa tingkat pemahaman dan kemampuan pemaknaan terhadap istilah teknis dan simbol-simbol bahasa akuntansi oleh penyedia ataupun pengguna laporan keuangan relatif rendah. Temuan tersebut diakui oleh Sandell & Svensson (2017) bahwa angka serta pengelompokan akuntansi sangat beragam, khususnya pada aspek penafsiran laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kebermanfaatan laporan keuangan bagi

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi tidak hanya terletak pada relevansi informasi, tetapi juga terletak pada tingkat keterbacaan laporan keuangan yang bersangkutan (Ajina, Laouiti, & Msolli, 2016; Davison, 2015; Richards & Staden, 2015; Tan, Wang, & Zhou, 2015).

Asay, Elliot, & Rennekamp (2017) menjelaskan bahwa keterbacaan laporan keuangan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dalam hal mengomunikasikan informasi akuntansi. Hal ini disebabkan setiap simbol (baik angka maupun kata) memiliki kompleksitas tersendiri. Kompleksitas ini sudah terjadi dari munculnya siklus akuntansi sampai penyajian laporan keuangan (Corrigan & Rixon, 2017; Ezat, 2019; Ginesi, Sannino, & Drago, 2017). Dalam konteks ini Chaidali & Jones (2017) dan Constable & Kuasirikun (2018) secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kata yang tepat sebagai representasi fenomena ekonomi perusahaan merupakan faktor penting untuk meningkatkan keterbacaan laporan keuangan, dengan diikuti penyajian angka secara tepat pula (dalam unit moneter) sebagai hasil proses pengukuran (Aerts & Yan, 2017; Jääskeläinen & Luukkanen, 2017; Marshall & Lennard, 2016; Moreno & Casasola, 2016).

Selain keterbacaan, Stone & Lodhia (2019) berpendapat bahwa kebermanfaatan laporan keuangan bagi pengguna juga dipengaruhi oleh tingkat keterpahaman, yaitu tingkat kemampuan pembaca laporan keuangan untuk memahami bahasa akuntansi yang terwujud pada kata dan angka. Dalam hal ini kebermanfaatan laporan keuangan sangat bergantung pada preferensi pembacanya. Implikasinya, representasi fenomena ekonomi perusahaan tidak cukup hanya melalui simbolisasi berupa kata dan angka, tetapi perlu penjelasan naratif yang memadai untuk mengungkapkan peristiwa atau fenomena ekonomi yang sebenarnya (Evans, 2018; Johansen & Plenborg, 2018; Pinto & Picoto, 2016).

Penelitian tentang dampak keterbacaan dan keterpahaman laporan keuangan pada perilaku pengguna telah banyak dilakukan (Ben-Amar & Belgacem, 2018; Chakrabarty, Seetharaman, Swanson, & Wang, 2018; Karyada & Irwanto, 2017; Luo, Li, & Chen, 2018; Osgerby, Marriott, & Gee, 2018; Porter, 2019). Palea (2018) menemukan bukti bahwa *integrated reports* mengandung kompleksitas informasi, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, sehingga keterba-

caan dan keterpahaman sangat diperlukan agar kebermanfaatan *integrated reports* bagi pengguna makin meningkat (Dosinta, Brata, & Heniwati, 2018; Pavlopoulos, Magnis, & Iatridis, 2017). Beattie & Davison (2015) menjelaskan bahwa keterbacaan dapat ditingkatkan melalui penggunaan “kata” (akun) yang mudah dimengerti, dan melalui “angka” yang diperoleh dari hasil pengukuran yang mudah dijelaskan kepada pengguna. Demikian pula dengan Davison (2015) juga menjelaskan bahwa keterpahaman pengguna atas *integrated reports* dapat ditingkatkan melalui pengungkapan (*disclosure*) dengan bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna pada umumnya. Hasil penelitian serupa juga ditemukan oleh Ben-Amar & Belgacem (2018) yang melakukan analisis isi atas laporan keuangan. Bukti lain ditemukan oleh Baxamusa, Jalal, & Jha (2018) bahwa keterbacaan laporan keuangan tahunan (*annual reports*) berpengaruh positif pada keputusan para analis pasar modal, karena keterbacaan laporan keuangan merupakan *properties* dalam *earning forecast* bagi mereka.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana upaya regulator penyusun standar akuntansi di Indonesia berupaya meningkatkan keterbacaan dan keterpahaman laporan keuangan. Jika penelitian terdahulu dilakukan dengan landasan positivisme (dengan pendekatan kuantitatif-statistik), penelitian ini dilakukan dengan landasan paradigma neo-positivisme (dengan pendekatan kualitatif-tematik). Berdasarkan paradigma neo-positivisme, penelitian ini berupaya untuk memberikan penilaian atas Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam upaya meningkatkan kebermanfaatan laporan keuangan melalui peningkatan keterbacaan dan keterpahaman. Penelitian ini juga menilai kepatuhan perusahaan publik (emiten) terhadap KPKK dan PSAK terkait dengan keterbacaan dan keterpahaman laporan keuangan yang dipublikasikan.

METODE

Berlandaskan paradigma neo-positivisme penelitian ini dilakukan dengan menerapkan analisis isi kualitatif. Adapun dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bahan tersaji pada Tabel 1.

Metode analisis isi relevan untuk diterapkan karena memungkinkan untuk meng-

Tabel 1. Dokumen dan Fokus dalam Penelitian Ini

Dokumen	Penyusun	Fokus Analisis Isi
Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan	DSAK-IAI	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, Keterbacaan, dan Keterpahaman
PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan	DSAK-IAI	Prinsip Pengungkapan Umum
PSAK 7 Pengungkapan Pihak Berelasi	DSAK-IAI	Prinsip Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Berelasi
PSAK 8 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan	DSAK-IAI	Prinsip Pengungkapan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi	DSAK-IAI	Prinsip Pengungkapan Aset dan Kewajiban Kontinjensi
PSAK 60 Instrumen Keuangan – Pengungkapan	DSAK-IAI	Prinsip Pengungkapan <i>Financial Assets</i> dan <i>Financial Liability</i>
Laporan Tahunan 2016 PT Ciputra Surya	PT Ciputra Surya	Praktik Pengungkapan aset lancar (kas dan setara kas, serta piutang)
Laporan Tahunan 2016 PT Total Bangun Persada	PT Total Bangun Persada	Praktik Pengungkapan <i>Financial Assets</i> dan <i>Financial Liability</i>
Laporan Tahunan 2016 PT Martina Berto	PT Martina Berto	Praktik Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Berelasi
Laporan Tahunan 2016 PT Blue Bird	PT Blue Bird	Praktik Pengungkapan Aset Kontinjensi dan Kewajiban Kontinjensi

analisis informasi yang sulit diukur (Finfgeld-Connett, 2014; Lacy, Watson, Riffe, & Lovejoy, 2015). Informasi tersebut mencakup teks dan narasi yang menjadi konten KKPK, PSAK, dan laporan keuangan tahunan perusahaan. Justifikasi hasil penelitian ini dilakukan dengan berefleksi pada terminologi “*jancuk*” yang merupakan kata ungkapan masyarakat Surabaya, Jawa Timur.

Dalam perspektif pemikiran Baudrillard (1981), sebagai simbol dalam komunikasi, istilah “*jancuk*” atau “*Jancukan*” merupakan simbol (*simulacra*) yang memiliki makna sangat dinamis dan sangat lentur, mulai dari makna yang benar-benar merujuk pada “*realitas sejati*” (makna kotor dan tidak sopan) hingga makna “*hiperrealitas*” (melampaui realitas atau tanpa makna yang jelas). Demikian pula bagi masyarakat Surabaya, Jawa Timur, “*jancuk*” merupakan kata yang sarat makna, bahkan makna kata “*jancuk*” atau “*Jancukan*” tidak merujuk pada realitas apa pun, kecuali hanya sebagai akronim *Suroboyoon*. Oleh Baudrillard (1983), dalam situasi demikian, kata “*jancuk*” atau “*Jancukan*” hanya berhenti sebagai simbol

tanpa ada yang disimbolkan, atau disebut sebagai *pure simulacra*. Dalam penelitian ini, sebagai refleksi hasil analisis, kata “*Jancukan*” adalah akronim dari “JANGAn CUKUp ANGka”, atau jika disisipkan tambahan kata dan frasa, akan menjadi lebih jelas “JANGAn (merasa) CUKUp (hanya menyajikan) ANGka” atau “JANGAn CUKUp (berhenti di) ANGka”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) diterbitkan untuk menegaskan tentang beberapa hal. Pertama, tujuan pembuatan ataupun publikasi pelaporan keuangan. Kedua, karakteristik informasi yang terkandung pada pelaporan keuangan, khususnya aspek kualitatif. Ketiga, serangkaian unsur mendasar yang terkandung pada laporan keuangan (definisi, pengakuan, dan pengukuran). Keempat, konsep dan pemeliharaan modal.

KKPK menyatakan bahwa tujuan umum pembuatan dan publikasi pelaporan keuangan pada hakikatnya adalah menyediakan informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak terkait, khususnya investor

dan kreditor. Namun, informasi keuangan yang merupakan hasil pengukuran transaksi-transaksi (peristiwa) secara ekonomis bukanlah satu-satunya informasi yang penting bagi pengguna laporan keuangan. KKPK menyadari realitas tersebut, dan karenanya, KKPK menegaskan bahwa penyajian informasi tersebut sebagai hasil pengukuran secara ekonomis tidak berarti menghalangi manajemen untuk memberikan informasi tambahan.

KKPK secara tegas menyatakan bahwa setiap elemen laporan keuangan merefleksikan kejadian ekonomi dalam “kata” serta “angka”. Hal ini berarti bahwa tujuan adanya laporan tersebut adalah memberikan informasi yang merepresentasikan fenomena ekonomis, yaitu fenomena dan peristiwa yang dapat diukur dalam unit moneter. Namun, KKPK juga menegaskan bahwa informasi keuangan juga harus merefleksikan secara tepat setiap kejadian ekonomi supaya berguna. Penegasan KKPK tersebut mengandung arti bahwa “angka” (dalam unit moneter) merupakan simbol numerik hasil pengukuran (*measurement*) sebagai representasi nilai ekonomi suatu fenomena, sedangkan “kata” merupakan simbol yang merujuk pada fenomena ekonomi (peristiwa) yang direpresentasikan.

Pengukuran fenomena ekonomi yang menghasilkan “angka” merupakan hal penting dalam pelaporan keuangan, tetapi pemilihan “kata” secara tepat untuk merepresentasikan fenomena ekonomi yang terjadi merupakan hal yang tidak kalah penting. Penyajian “angka” sebagai representasi nilai ekonomi tidaklah cukup memberikan pemahaman kepada pengguna laporan keuangan jika tidak diikuti penyajian “kata” yang tepat untuk menggambarkan fenomena ekonominya. Lebih dari itu, penjelasan kualitatif juga sangat diperlukan agar pembaca laporan keuangan juga memahami realitas yang ada di balik fenomena ekonomis yang dilaporkan. Oleh karena itu, KKPK menegaskan pentingnya penggunaan simbol-simbol (“kata” dan “angka”) secara tepat sebagai prinsip untuk meningkatkan kebermanfaatan informasi keuangan bagi pengguna. Prinsip tersebut, *ala Suroboyono*, dalam artikel ini disebut sebagai prinsip “*Jancukan*” atau jika dipanjangkan menjadi prinsip “JANgan CUKup ANgka”, “JANgan (merasa) CUKup (hanya menyajikan) ANgka”, atau “JANgan CUKup (berhenti di) ANgka. Maksud KKPK dengan prinsip “*Jancukan*” ini adalah bahwa dalam

pelaporan keuangan akuntan jangan merasa cukup hanya menyajikan “angka” sebagai hasil pengukuran, tetapi harus mampu memilih “kata” yang tepat untuk menggambarkan realitas ekonomi yang sesungguhnya terjadi, bahkan menggambarkan realitas lain yang ada di balik realitas ekonomis.

Prinsip “*Jancukan*” seperti ditegaskan dalam KKPK tersebut secara empirik telah ditegaskan pula oleh Biondi & Lapsley (2014) yang mengkaji peran akuntansi dalam penyajian informasi keuangan sebagai representasi realitas ekonomis dari benda-benda purbakala atau aset bersejarah (*heritage assets*) yang tersimpan pada beberapa museum. Aversano & Christiaens (2014) juga menemukan bahwa nilai ekonomis *heritage assets* perlu dilaporkan agar masyarakat New Zealand memahami bahwa *heritage assets* merupakan benda-benda peninggalan sejarah yang sangat berharga bagi bangsa. Pernyataan tersebut sejalan dengan argumen Aversano, Christiaens, & Thielen (2019) dan Ellwood & Greenwood (2016) bahwa benda-benda peninggalan sejarah memiliki nilai ekonomis dalam konteks kekinian, dan karenanya, akuntansi dan pelaporan informasi ekonomis atas benda-benda bersejarah tersebut menjadi penting. Argumen yang sama juga diungkapkan oleh Woon, Chatterjee, & Cordery (2019).

Namun, sebagaimana dinyatakan oleh Christiaens, Rommel, Barton, & Everaert (2012) pengukuran nilai ekonomis *heritage assets* menghadapi problematika tersendiri dibandingkan dengan pengukuran nilai ekonomis aset-aset lain pada organisasi bisnis. Pertama, *heritage assets* tidak diproduksi secara berulang. Kedua, *heritage assets* tidak memiliki pasar. Oleh karena itu, pengukuran nilai ekonomis atas *heritage assets* cukup sulit sehingga hasil pengukuran bersifat subjektif.

Dalam konteks ini prinsip “*Jancukan*” diungkapkan dalam temuan Kurniati, Asmony, & Santoso (2017) bahwa informasi laporan keuangan dari mengenai aset tidak hanya menyajikan informasi ekonomis (angka moneter) atas *heritage assets*, tetapi juga memberikan penjelasan kualitatif tentang dasar dan pendekatan pengukuran yang merepresentasikan nilai ekonomis *heritage assets* bersifat subjektif, laporan keuangan beberapa museum di New Zealand memberikan penjelasan yang sama tentang pendekatan pengukuran *heritage assets*, di antara-

nya adalah mempertimbangkan aspek nilai estetika (seni), nilai sosial, dan nilai budaya dari *heritage assets* yang bersangkutan. Penjelasan kualitatif sebagai wujud prinsip “Jancukan” tersebut merupakan standar wajib (*mandatory standard*) yang ditetapkan oleh regulator.

Urgensi prinsip “Jancukan” juga diungkapkan oleh Ellwood dan Greenwood (2015) yang berargumentasi bahwa betapa “tidak pentingnya” informasi keuangan jika tidak diikuti pengungkapan informasi lain yang sebenarnya lebih bernilai (*valuable*) bagi pengguna laporan keuangan. Ellwood dan Greenwood (2015) menyatakan bahwa laporan keuangan lebih menonjolkan nilai-nilai ekonomis hasil pengukuran (*economic value measurement*) berupa angka-angka akuntansi tanpa diikuti pengungkapannya.

Menurut Ellwood & Greenwood (2015) pelaporan nilai ekonomis (*economic value*) memang penting untuk menginformasikan kepada masyarakat (pengguna laporan keuangan) tentang nilai aset secara ekonomis. Namun, pelaporan nilai ekonomis atas aset-aset budaya tersebut menjadi kurang bermanfaat bagi masyarakat karena tidak diikuti dengan pengungkapan informasi tentang nilai-nilai budaya (*cultural value*) yang melekat pada aset-aset tersebut yang sesungguhnya perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Pembaca laporan keuangan seharusnya tidak hanya diberi informasi tentang nilai ekonomis aset bersejarah dalam konteks kekinian, tetapi akuntansi seharusnya juga memberikan informasi lain yang sangat berguna, yaitu pengungkapan nilai sosial dan nilai budaya atas aset.

Konsep dan fakta tersebut menunjukkan bahwa prinsip “Jancukan” dalam pelaporan informasi keuangan sangat penting karena pelaporan informasi keuangan yang hanya mengedepankan angka-angka moneter hasil pengukuran akuntansi tidak cukup untuk merepresentasikan realitas secara utuh. Oleh karena itu, prinsip “Jancukan” menuntut pelaporan keuangan yang memberikan pengungkapan informasi lain non-moneter yang dianggap dapat menambah kebermanfaatan informasi keuangan tersebut. KKPK menegaskan pentingnya prinsip “Jancukan” tersebut dengan menyatakan bahwa adanya penjabaran yang utuh mengenai fenomena usaha. Implementasinya, prinsip “Jancukan” lebih luas, KKPK mengarahkan agar akuntan melakukan pengungkapan (*disclosure*) yang dipandang

perlu agar kebermanfaatan laporan keuangan bagi pengguna makin meningkat.

Dalam hal ini, KKPK menegaskan bahwa penjabaran lengkap memerlukan penjelasan dari fenomena keuangan yang sifatnya komprehensif. Makna prinsip “Jancukan” pada KKPK adalah bahwa kebermanfaatan informasi akuntansi bagi pengguna akan meningkat jika kata dan angka (sebagai simbol-simbol fenomena ekonomi) disajikan dengan diberi diskripsi dan penjelasan yang cukup.

Fakta bahwa DSAK-IAI telah mempertimbangkan prinsip “Jancukan” dalam KKPK sebagaimana diuraikan di atas merupakan realitas yang patut untuk diapresiasi, mengingat bahwa akuntansi (dalam konteks bahasa bisnis) masih mengandung setidaknya permasalahan utama (Brennan & Merkl-Davies, 2014; Ginesti, Sannino, & Drago, 2017; Moreno & Casasola, 2016). Ezat (2019) berargumentasi bahwa permasalahan tersebut adalah keterbacaan dan keterpahaman. Implementasi prinsip “Jancukan” merupakan upaya DSAK-IAI untuk meningkatkan keterbacaan dan keterpahaman. Oleh karena itu, dalam ranah praktik pelaporan keuangan, PSAK yang disusun dengan berlandas pada Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), sejatinya juga menerapkan prinsip “Jancukan”. Mengingat bahwa KKPK menekankan implementasi prinsip “Jancukan” (JANgan (merasa) CUKup (hanya menyajikan) Angka) dalam pelaporan keuangan, maka PSAK wajib mengikuti prinsip “Jancukan” tersebut. Dengan konsekuen, seluruh PSAK yang disusun oleh DSAK-IAI telah menekankan pentingnya prinsip “Jancukan” dalam penyajian informasi keuangan.

Penekanan kewajiban akuntan untuk mengimplementasikan prinsip “Jancukan” seperti diatur dalam KKPK ditemukan dalam PSAK 1. Prinsip “Jancukan” tersirat pada aturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyusun catatan atas laporan keuangan. Hal ini termuat dalam PSAK 1 yang berargumentasi bahwa laporan keuangan yang lengkap harus mencakup sejumlah komponen, mulai laporan laba-rugi komprehensif sampai catatan atas laporan keuangan. Hal tersebut secara implisit menegaskan bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan perwujudan dari prinsip “Jancukan”. Catatan tersebut diperlukan karena “kata” atau “frasa” (nama akun sebagai simbol representasi fenomena atau peristiwa) dan “angka” (representasi nilai ekonomi ha-

sil pengukuran) tidak cukup memberikan pemahaman kepada pengguna tentang fenomena ekonomi yang direpresentasikan. Oleh karena itu, prinsip “*Jancukan*” telah menjadi parameter PSAK 1, khususnya pada aspek penyajiannya.

Lebih lanjut, PSAK 1 mewajibkan akuntan (manajemen) untuk mengimplementasikan prinsip “*Jancukan*” dalam konteks tujuan menghilangkan keraguan pengguna atas “kata” dan “angka” yang telah dilaporkan. Dalam konteks ini, PSAK 1 mengimplementasikan prinsip “*Jancukan*” tersebut dengan mewajibkan akuntan (manajemen) untuk mengungkapkan *going concern* dari operasional perusahaan. PSAK 1 menegaskan bahwa ketidakpastian suatu usaha harus diungkapkan dalam laporan.

Bukti kebermanfaatan implementasi prinsip “*Jancukan*” atas pengungkapan ketidakpastian *going concern* tersebut telah diungkapkan oleh Bochkay, Chychyla, Sankaraguruswamy, & Willenborg (2018) dan Mayew, Sethuraman, & Venkatachalam (2015), yang berargumentasi bahwa pengungkapan tentang ketidakpastian atas kelangsungan usaha entitas direpson negatif oleh investor yang tampak dari fenomena penurunan harga saham di sekitar tanggal publikasi laporan keuangan. Demikian pula Bédard, Brousseau, & Vanstraelen (2019) dan Dong, Robinson, & Robinson (2015) menemukan bukti bahwa investor tidak menghendaki adanya informasi mengenai ketidakpastian laba. Penelitian Kumar & Lim (2015) dan Xu, Dao, & Wu (2018) juga menemukan fakta yang sama, bahwa pengungkapan tentang ketidakpastian kelangsungan usaha entitas berpengaruh negatif pada *stock pricing* yang dilakukan oleh para analis keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip “*Jancukan*” sangat diperlukan dalam pelaporan keuangan, karena dalam konteks ini, pengungkapan informasi kualitatif tentang status *going concern* perusahaan lebih penting untuk dipertimbangkan oleh pengguna laporan keuangan (investor dan analis keuangan) dalam mengambil keputusan. Bagi para pengguna laporan keuangan, “angka” (moneter) menjadi kurang bermanfaat untuk dipertimbangkan karena ada faktor kualitatif yang dipandang lebih berguna. Prinsip “*Jancukan*” di atas dapat menghindarkan pengguna laporan keuangan dari kesesatan dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan “kata” dan “angka” dalam laporan keuangan. Kesesatan pengguna akan terhindarkan,

karena pengguna dapat mengevaluasi keberlanjutan “kata” dan “angka” di masa depan, karena kemampuan perusahaan untuk *going concern* diungkapkan.

Prinsip “*Jancukan*” juga dapat ditemukan dalam PSAK 7. Pedoman ini mewajibkan akuntan (manajemen) untuk mengungkapkan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berhubungan khusus. Untuk membantu pengguna laporan keuangan menilai risiko dalam pengambilan keputusan, realitas ekonomi atas transaksi dengan berhubungan khusus tidak cukup hanya direpresentasikan dalam “kata” dan “angka” dalam laporan keuangan. Dalam hal ini PSAK 7 menerapkan prinsip “*Jancukan*” dengan cara mengatur transparansi hubungan tersebut dan dampaknya bagi laporan keuangan. Prinsip “*Jancukan*” dalam PSAK 7 dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan memahami setiap detail transaksi yang memiliki hubungan khusus. Jika hal-hal tersebut diungkapkan, pengguna laporan keuangan dapat menilai potensi yang mungkin terjadi dari hubungan tersebut.

Prinsip “*Jancukan*” yang diterapkan dalam PSAK 7 sangat tepat dan logis karena dengan adanya hubungan dengan pihak berhubungan khusus, suatu perusahaan dapat melakukan transaksi apa pun yang dikehendaki dengan suatu bentuk persetujuan atau persekongkolan tertentu yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh pihak lain. Transaksi dengan suatu persekongkolan dapat mempengaruhi informasi keuangan entitas sesuai dengan yang diinginkan.

Bukti kebermanfaatan implementasi prinsip “*Jancukan*” pada PSAK 7 tersebut telah diperoleh Lopes & Reis (2019) dan Tseng, Lin, & Yen (2015) dari penelitian mereka yang memperoleh fakta bahwa pengungkapan *related party transactions* memiliki relevansi nilai (*value relevance*) bagi investor. Investor merespon positif transaksi dengan pihak yang berhubungan khusus. Dalam konteks ini pengungkapan transaksi dengan pihak yang berhubungan khusus dipandang sebagai cermin dari kualitas laba (*earnings quality*). Hall (2016) menemukan bukti bahwa informasi laba dan pengungkapan transaksi dengan pihak berhubungan khusus mendapat respon positif oleh investor. Bukti yang sama dikemukakan oleh temuan Erb & Pelger (2015) dan Riduwan & Andayani (2018) yang berargumentasi bahwa para analis keuangan tidak hanya menilai bagaimana

“angka-angka” pertumbuhan laba yang dilaporkan perusahaan, tetapi juga memperhatikan “kualitas” pertumbuhan laba tersebut. Para analis keuangan mengevaluasi kualitas pertumbuhan laba dengan melihat bagaimana proses perolehannya, dengan siapa, transaksinya apa, jumlahnya berapa, dan saldo yang belum terselesaikan berapa. Para analis keuangan menganalisis proses perolehan laba tersebut dari pengungkapan pihak yang berubungan khusus dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip “Jancukan” dalam pelaporan keuangan, khususnya dalam konteks pengungkapan transaksi dengan pihak tersebut adalah penting bagi pengguna laporan keuangan.

Selain PSAK 1 dan PSAK 7, PSAK 8 juga mengatur pelaporan berdasar prinsip “Jancukan”. Manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan yang diterbitkan, sebagaimana disebutkan dalam PSAK 1, dan sebagai bentuk tanggungjawab tersebut, manajemen melakukan otorisasi atas penerbitan laporan. Dalam rangka implementasi prinsip “Jancukan”, tanggal otorisasi penerbitan laporan keuangan harus diungkapkan. Seperti ditegaskan dalam PSAK 8 bahwa perusahaan mengungkapkan tanggal otorisasi penerbitan laporan keuangan dan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan otorisasi laporan keuangan tersebut.

Prinsip “Jancukan” PSAK 8 tidak hanya mewajibkan entitas untuk mengungkapkan tanggal otorisasi penerbitan laporan keuangan, tetapi juga mewajibkan entitas untuk mengungkapkan peristiwa penting yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal otorisasi penerbitan laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini PSAK 8 menegaskan bahwa jika perusahaan memperoleh informasi setelah periode pelaporan tentang suatu kondisi pada akhir periode pelaporan, maka perusahaan memutakhirkan pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terbaru yang diketahui. Jika peristiwa setelah akhir periode pelaporan bersifat material, maka dengan tidak diungkapkannya hal tersebut, pengguna laporan keuangan akan terpengaruh dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perusahaan wajib mengungkapkan informasi tersebut yang mencakup informasi tentang sifat peristiwa dan estimasi tentang dampak keuangan yang menyertainya. Implementasi prinsip “Jancukan” PSAK 8 dalam bentuk kewajiban pengungkapan tanggal otorisasi penerbitan

bertujuan agar pengguna laporan mampu mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab manajemen antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal otorisasi penerbitannya. Tanggung jawab manajemen yang dimaksud adalah terkait dengan kejujuran manajemen untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi antara tanggal-tanggal tersebut yang (mungkin) mempengaruhi pemahaman pengguna atas “kata” dan “angka” yang telah disajikan dalam laporan keuangan.

Bukti kebermanfaatan implementasi prinsip “Jancukan” atas pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan tersebut telah diperoleh Elbakry, Nwachukwu, Abdou, & Elshandidy (2017) dari penelitian mereka yang memperoleh fakta bahwa pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan memiliki relevansi nilai (*value relevance*) bagi investor. Penelitian tersebut juga diperkuat bukti bahwa investor merespon positif pengungkapan restrukturisasi perusahaan yang dilakukan setelah tanggal pelaporan (Elshandidy, 2014; Zheng, Lee, & Zhang, 2016). Bukti yang sama ditemukan oleh Abdullah, Evans, Fraser, & Tsalavoutas (2015) dan Power, Cleary, & Donnelly (2017) yang berargumentasi bahwa pengungkapan peristiwa-peristiwa penting setelah tanggal pelaporan memiliki relevansi nilai (*value relevance*) yang bermanfaat bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Mengingat sedemikian pentingnya prinsip “Jancukan” atas pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan, penelitian Brown & Popova (2019) membuktikan bahwa auditor pun harus berhati-hati sebelum menyatakan opini dalam laporan audit, karena harus memastikan apakah terdapat peristiwa setelah tanggal pelaporan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Tidak terbatas pada PSAK 1, PSAK 7, dan PSAK 8, prinsip “Jancukan” juga diimplementasikan pada PSAK 57. Pada tanggal pelaporan keuangan, perusahaan (entitas) mungkin memiliki kewajiban yang harus dipenuhi di masa mendatang. Kewajiban tersebut memiliki dua karakteristik, yaitu kewajiban diestimasi dan kewajiban kontinjensi. Kewajiban diestimasi sudah pasti harus dipenuhi meskipun waktu dan jumlahnya tidak pasti (dapat berubah karena perubahan estimasi). Oleh karena itu, kewajiban diestimasi harus dilaporkan dalam laporan keuangan dengan jumlah (nilai) estimasian. Namun, PSAK 57 mewajibkan

penerapan prinsip “*Jancukan*” atas informasi kewajiban diestimasi agar para pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. PSAK 57 menegaskan bahwa perusahaan wajib mengungkapkan setiap jenis kewajiban diestimasi. Pengungkapan tersebut mencakup: penjelasan tentang karakteristik kewajiban, estimasi waktu di mana sumber daya perusahaan diperlukan untuk memenuhinya, dan indikasi tentang adanya ketidakpastian waktu dan jumlah arus keluar sumber daya ekonomis yang diperlukan tersebut. PSAK 57 juga menegaskan bahwa perusahaan wajib mengungkapkan asumsi utama yang mendasari estimasi peristiwa pada masa yang akan datang, serta jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut.

Berbeda dengan kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi belum pasti dipenuhi karena kepastian keharusan untuk memenuhinya bergantung pada peristiwa di masa mendatang. Implikasinya, perusahaan (entitas) tidak diperkenankan untuk mengakui dan melaporkan kewajiban kontinjensi dalam laporan keuangan. Namun, setiap pengguna laporan perlu mengetahui adanya kewajiban kontinjensi sebagai fenomena ekonomi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini PSAK 57 mewajibkan entitas menerapkan prinsip “*Jancukan*” bahwa perusahaan wajib mengungkapkan setiap jenis kewajiban kontinjensi yang dimiliki pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut mencakup uraian ringkas tentang karakteristik kewajiban kontinjensi, estimasi atas dampak keuangannya, indikasi tentang adanya ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu dikeluarkannya sumber daya yang diperlukan, serta kemungkinan penggantian yang akan diterima dari pihak ketiga.

Kebermanfaatan prinsip “*Jancukan*” dalam konteks pengungkapan kewajiban kontinjensi tersebut telah lama ditemukan oleh Bacchiega, Bonroy, & Petrakis (2018) dan Chen, Hou, Richardson, & Ye (2018) yang menemukan bukti bahwa pemegang saham merevisi kontrak insentif bagi manajer ketika pemegang saham mengetahui adanya kewajiban kontinjen pada masa mendatang. Demikian pula penelitian Buccina, Chene, & Gramlich (2008) dan Lopes & Reis (2019) yang menemukan bukti bahwa pengungkapan kewajiban kontinjen terkait dengan

pembayaran pensiun karyawan di masa depan yang bergantung pada pilihan-pilihan metode aktuarial, direspon negatif oleh pelaku pasar modal. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip “*Jancukan*” merupakan prinsip pelaporan keuangan yang menambah kebermanfaatan informasi keuangan bagi para pengguna. Namun Cen, Chen, Hou & Richardson (2018) menyatakan bahwa pengungkapan kewajiban kontinjen harus mempertimbangkan materialitas. Aspek materialitas pengungkapan kewajiban kontinjen ini juga telah ditegaskan dalam PSAK 57.

Serupa dengan kewajiban kontinjensi, entitas tidak diperkenankan untuk mengakui dan menyajikan aset kontinjensi dalam laporan keuangan. Aset kontinjensi ini tidak diakui dalam laporan keuangan karena memicu adanya pengakuan penghasilan yang belum atau tidak akan terealisasi. Meskipun tidak tersaji dalam laporan keuangan, pengguna perlu mengetahui adanya aset kontinjensi sebagai fenomena ekonomi tersebut. Dalam konteks aset kontinjensi ini, PSAK 57 mewajibkan entitas menerapkan prinsip “*Jancukan*” bahwa jika ada kemungkinan besar diperolehnya manfaat ekonomis, perusahaan harus mengungkapkan secara singkat tentang sifat aset kontinjensi pada akhir periode pelaporan, serta estimasi dampak keuangannya. Prinsip “*Jancukan*” yang diatur dalam PSAK 57 makin jelas memberikan penyadaran bahwa “angka” tidak cukup untuk memberikan pemahaman kepada pihak terkait sehingga laporan keuangan juga menjadi berguna bagi mereka. Dalam konteks PSAK 57, jumlah (nilai) aset dan kewajiban kontinjensi belum dapat diukur dengan andal sehingga tidak dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Akan tetapi, kewajiban dan aset kontinjensi merupakan fenomena ekonomi yang (mungkin) dapat mempengaruhi operasi entitas di masa depan yang perlu diketahui oleh pengguna. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan dalam bentuk “angka”, informasi tentang aset dan kewajiban kontinjensi penting untuk diungkapkan dalam bentuk narasi yang memberikan pemahaman bagi pengguna “melampaui angka”.

Selain PSAK-PSAK di atas, prinsip “*Jancukan*” juga tegas digunakan dalam PSAK 60. PSAK 60 menyadari bahwa pengukuran, pengakuan, dan penyajian instrumen keuangan hanya dalam “angka” tidak cukup memberikan pemahaman kepada

pengguna tentang fenomena ekonomi yang direpresentasikan, khususnya tentang risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, PSAK 60 mewajibkan adanya pengungkapan informasi jenis dan tingkat risiko dalam instrumen keuangan dari kegiatan entitas. Prinsip “Jancukan” sangat tepat diterapkan dalam PSAK 60 yang khusus mengatur kewajiban pengungkapan risiko yang melekat pada instrumen keuangan sebagai fenomena ekonomi yang direpresentasikan dalam laporan keuangan. Berlandaskan prinsip “Jancukan” PSAK 60 menegaskan kewajiban pengungkapan risiko instrumen keuangan yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan segala jenis risiko yang timbul dari kegiatan operasional. Pengungkapan yang dimaksud PSAK 60 tersebut terfokus pada risiko yang mungkin akan timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana risiko tersebut telah dikelola oleh perusahaan. Risiko-risiko ini pada umumnya mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.

Pengungkapan tersebut mencakup pengungkapan kualitatif ataupun kuantitatif. Dalam pengungkapan kualitatif setiap perusahaan wajib mengungkapkan setiap unsur yang ada dalam risiko, sedangkan dalam pengungkapan kuantitatif, perusahaan wajib menganalisis tingkat sensitivitas setiap risiko. Dalam konteks ini prinsip “Jancukan” PSAK 60 kembali menegaskan bahwa apabila secara kuantitatif data yang diungkapkan pada akhir periode pelaporan tidak merepresentasikan risiko perusahaan, maka perusahaan wajib menyediakan informasi lebih lanjut yang representatif. Prinsip “Jancukan” dalam PSAK 60 tersebut memberikan penyadaran bahwa pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna yang hanya berfokus pada “angka” (informasi finansial) pada laporan keuangan tidak cukup mendukung ketepatan keputusan ekonomi yang dilakukan. Oleh karena itu, akuntan seharusnya tidak hanya menyajikan “angka”, tetapi juga wajib memberikan penjelasan melalui narasi yang representatif sehingga memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi realitas (sifat dan kualitas) yang berada di balik “angka” tersebut.

Fakta bahwa DSAK-IAI telah menindaklanjuti implementasi prinsip “Jancukan” dalam setiap PSAK yang diterbitkan sebagaimana tersebut di atas juga patut untuk diapresiasi, mengingat bahwa keterbacaan dan keterpahaman merupakan determinan kebermanfaatan laporan

keuangan bagi pengguna (Lee, 2012; Moreno & Casasola, 2016). Asay, Elliott, & Rennekamp (2017) juga mengingatkan tentang urgensi penyusun standar akuntansi (*accounting standards setter*) untuk menetapkan standar dengan memperhatikan aspek keterbacaan dan keterpahaman tersebut. Laporan keuangan harus memberikan nilai bagi pengguna (Feng, Cummings, & Tweedie, 2017), sehingga keterbacaan dan keterpahaman harus memperoleh perhatian dari standard setter (Cheung & Lau, 2016; Wang, Hsieh, & Sarkis, 2018). Keterbacaan dan keterpahaman laporan keuangan dapat dilakukan melalui pemilihan kata dan angka (pengukuran) yang tepat (Abdo, Mangena, Needham, & Hunt, 2018; Rosenkranz & Pollach, 2016) atau pengungkapan (*disclosures*) yang memadai, baik melalui catatan atas laporan keuangan maupun catatan kaki atau *footnotes* (Edgar, Beck, & Brennan, 2018; Leung, Parker, & Courtis, 2015; Yekini, Wisniewski, & Millo, 2016).

Secara empiris penelitian ini juga menemukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan publik (emiten) di Indonesia telah mematuhi prinsip “Jancukan” dan mengimplementasikannya dalam pelaporan keuangan. Kepatuhan atas prinsip tersebut terefleksi dalam beberapa hal. Pertama, penggunaan “kata” atau “frasa” (sebagai nama akun) untuk merepresentasikan fenomena, serta penggunaan “angka” (hasil pengukuran) untuk merepresentasikan nilai ekonomi dari fenomena yang bersangkutan. Kedua, penjelasan (diskripsi) lebih rinci dalam catatan atas laporan keuangan tentang fenomena ekonomi yang direpresentasikan melalui “kata” dan “angka”. Ketiga, pengungkapan hal-hal lain lebih luas yang mampu meningkatkan pemahaman pihak terkait berkaitan dengan fenomena ekonomi. Keempat, pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan yang mempengaruhi dan/atau tidak mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan. Berikut ini adalah diskripsi hasil analisis isi laporan keuangan emiten tahun 2016 yang menunjukkan kepatuhan perusahaan pada prinsip “Jancukan”.

Dalam laporan posisi keuangan PT Ciputra Surya merepresentasikan alat-alat pembayaran likuid yang dimiliki per 31 Desember 2016 dalam “kata” dan “angka” melalui simbol “Kas dan Setara Kas Rp1.539.466.798.395”,00. Berdasarkan prinsip “Jancukan”, PT Ciputra Surya menjabarkan informasi bahwa “Kas dan

Setara Kas” tersebut terdiri atas Kas di tangan Rp3.105.877.902,00 Kas di bank Rp287.035.639.830,00 dan Deposito Berjangka Rp1.249.325.280.663. Dalam CALK, masing-masing unsur “Kas dan Setara Kas” tersebut juga dijabarkan sangat rinci. Agar informasi keuangan lebih bermanfaat bagi pengguna, berdasarkan prinsip “*Jancukan*”, PT Ciputra Surya juga memberikan penjelasan lebih luas tentang upaya untuk menghindari risiko kecurian dan risiko lainnya atas “Kas dan Setara Kas” yang dimiliki, melalui penjelasan:

“Seluruh kas telah diasuransikan terhadap risiko kecurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp21.100.000.000,00 kepada PT Chubb General Insurance Indonesia (dahulu PT ACE Jaya Proteksi) pada tanggal 31 Desember 2016...Manajemen Kelompok Usaha berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut” (PT Ciputra Surya, 2016:80).

Agar laporan keuangan secara keseluruhan berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi pada saat ini maupun di masa depan, PT Ciputra Surya menerapkan prinsip “*Jancukan*” lebih luas. Prinsip “*Jancukan*” tersebut diwujudkan dalam bentuk pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan sebagai berikut.

“Pada bulan Oktober 2016, Perusahaan bersama-sama dengan PT Ciputra Surya Tbk (CTRS) dan PT Ciputra Property Tbk (CTRP), keduanya entitas anak, menyampaikan surat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan rencana penggabungan usaha CTRS dan/atau CTRP (Perusahaan yang Bergabung) ke dalam Perusahaan (secara kolektif disebut Peserta Penggabungan), di mana Perusahaan atau CTRA menjadi Perusahaan Hasil Penggabungan (*surviving entity*)” (PT Ciputra Surya, 2016:133)

Walaupun tidak berdampak pada penyesuaian Laporan Keuangan tahun 2016, pengungkap-an peristiwa setelah periode pelaporan tersebut bermanfaat bagi pihak terkait. Dengan pengungkapan tersebut, pihak terkait mengetahui bahwa tahun 2016 merupakan tahun terakhir eksistensi PT Ciputra Surya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selanjutnya, dalam laporan posisi keuangan, PT Total Bangun Persada merepresentasikan kewajiban jangka panjang perusahaan untuk membayar imbalan kerja kepada karyawan per 31 Desember 2016 dalam “kata” dan “angka” melalui simbol “liabilitas diestimasi atas imbalan kerja Rp163.920.693.000,00”. Berdasarkan prinsip “*Jancukan*”, PT Total Bangun Persada menjelaskan informasi bahwa “liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja” tersebut terdiri atas imbalan pascakerja Rp152.430.197.000,00 dan imbalan kerja jangka panjang lainnya Rp11.490.496.000,00. Dalam catatan atas laporan keuangan, perhitungan jumlah masing-masing unsur “tersebut juga dijabarkan sangat rinci. Berdasarkan prinsip “*Jancukan*”, Total Bangun Persada memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konsultan yang ditunjuk untuk menghitung “liabilitas diestimasi atas imbalan kerja” yang dilaporkan. Total Bangun Persada menjelaskan:

“Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2016 dihitung oleh PT Padma Radya Aktuaria dengan laporannya pada tanggal 10 Februari 2017, yang terdiri atas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka panjang lainnya merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai setelah bekerja selama tahun tertentu. Entitas dan Entitas Anak belum menetapkan pendanaan untuk kedua program tersebut.” (PT Total Bangun Persada, 2016:55).

Agar informasi “Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja” dipahami oleh pengguna, PT Total Bangun Persada juga telah menguraikan dengan jelas asumsi-asumsi aktuarial yang digunakan untuk menghitung beban dan liabilitas imbalan kerja. Dalam

konteks ini prinsip “Jancukan” bermaksud memberikan penjelasan agar pengguna laporan keuangan dapat memprediksi perubahan yang mungkin terjadi atas kewajiban entitas dalam membayar imbalan kerja di masa depan.

Pada bagaian yang lain PT Total Bangun Persada menerapkan prinsip “Jancukan” dengan leboh luas. Hal ini dilakukan supaya laporan keuangan secara keseluruhan dapat digunakan sebagai alat *decision maker* pada saat ini ataupun di masa depan. Prinsip “Jancukan” tersebut diwujudkan dalam bentuk pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan berikut:

“Berdasarkan surat No. 002/IR.02/I/2017 tanggal 3 Januari 2017, mengenai Laporan Informasi atau Fakta Material yang dikirimkan manajemen entitas kepada PT Bursa Efek Indonesia menyebutkan bahwa Komisaris Independen entitas yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit Entitas yaitu Drs. H. Mustofa, Ak., telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2016. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasi, posisi jabatan tersebut belum terdapat pengganti” (PT Total Bangun Persada, 2016:81).

Walaupun tidak berdampak pada penyesuaian Laporan Keuangan tahun 2016, pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan tersebut bermanfaat bagi penggunaanya. Dengan pengungkapan tersebut pengguna laporan keuangan mengetahui bahwa tahun 2016 seorang pejabat penting PT Total Bangun Persada telah meninggal dunia. Bagi pengguna informasi peristiwa setelah tanggal pelaporan tersebut (mungkin) dapat mempengaruhi keputusan ekonomi mereka.

Pada sisi lainnya, laporan keuangan PT Martina Berto merepresentasikan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok selama tahun 2016 dalam “kata” dan “angka” melalui simbol “Penjualan Neto Rp685.443.920.925,00”. Berdasarkan prinsip “Jancukan”, PT Martina Berto menjabarkan informasi bahwa “Penjualan Neto” tahun 2016 tersebut merupakan penjualan tiga jenis produk, yang terdiri atas penjualan Kosmetik Rp895.926.456.612,00, Jamu Rp5.168.306.139,00, dan Lainnya

Rp52.790.008.230,00 setelah dikurangi diskon penjualan Rp231.470.194.237,00, dan retur penjualan Rp36.970.655.819,00. Berdasarkan prinsip “Jancukan” PT Martina Berto memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa 85,80% dari jumlah penjualan tahun 2016 dilakukan dengan pihak terkait. PT Martina Berto menjelaskan:

“Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi yang meliputi transaksi penjualan, pembelian, royalti, dan transaksi keuangan lainnya. Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut...” (PT Martina Berto, 2016:57).

Berdasarkan prinsip “Jancukan”, jumlah (nilai) transaksi antara PT Martina Berto dengan pihak yang berhubungan khusus. Penjabaran informasi tentang transaksi dengan pihak-pihak yang berhubungan khusus sangat penting bagi pengguna laporan keuangan karena dapat digunakan untuk mengevaluasi bahwa kemungkinan informasi keuangan terpengaruh oleh keberadaan dan transaksi dengan pihak terkait. Dengan mengungkapkan transaksi, saldo, dan komitmen dengan pihak-pihak tersebut, pengguna laporan keuangan PT Martina Berto memiliki pengetahuan tentang segala hal mengenai transaksi dengan pihak terkait. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi operasi perusahaan, termasuk penilaian risiko dan kesempatan yang dihadapi PT Martina Berto.

Berdasarkan prinsip “Jancukan”, jumlah (nilai) transaksi antara PT Martina Berto dengan pihak yang berhubungan khusus (pembelian, penjualan, dan royalti) juga dijabarkan secara rinci, termasuk saldo akun (utang-piutang) per tanggal pelaporan. Penjabaran informasi tentang transaksi dengan pihak-pihak yang berhubungan khusus sangat penting bagi pengguna laporan keuangan karena dapat digunakan untuk mengevaluasi bahwa kemungkinan informasi keuangan terpengaruh oleh keberadaan dan transaksi dengan pihak terkait. Dengan mengungkapkan transaksi, saldo, dan komitmen dengan pihak tersebut, pengguna laporan keuangan PT Martina Berto memiliki pengetahuan tentang segala hal mengenai transaksi dengan pihak terkait. Dengan demikian, pengguna

laporan keuangan dapat mengevaluasi operasi perusahaan, termasuk penilaian risiko dan kesempatan yang dihadapi PT Martina Berto. Agar laporan keuangan secara keseluruhan berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi pada saat ini maupun di masa depan, PT Martina Berto menerapkan prinsip “*Jancukan*” lebih luas. Prinsip “*Jancukan*” tersebut diwujudkan dalam bentuk pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan sebagai berikut:

“Pada tahun 2017 perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No.0018/406/15/054/17 tanggal 14 Maret 2017 untuk masa tahun pajak 2015 atas pajak penghasilan badan. Perusahaan akan menerima sebesar Rp2.992.922.300,00 dari total taksiran klaim sebesar Rp5.633.701.998,00” (PT Martina Berto, 2016:65)

Walaupun tidak berdampak pada penyesuaian Laporan Keuangan tahun 2016, pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan tersebut bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dengan pengungkapan tersebut, pengguna laporan keuangan dapat menilai potensi arus kas PT Martina Berto di masa depan.

Pada sisi lainnya, untuk lingkup informasi yang berbeda, dalam laporan posisi keuangan, PT Blue Bird merepresentasikan fenomena ekonomi terkait dengan instrumen keuangan (aset keuangan dan liabilitas keuangan) dengan bermacam-macam simbol berupa “kata” (nama akun) dan “angka” (jumlah numerik). Agar informasi tentang instrumen keuangan lebih bermanfaat, Blue Bird menerapkan prinsip “*Jancukan*” yang diatur dalam PSAK 1 dengan cara menjabarkan dan menjelaskan secara rinci setiap unsur instrumen keuangan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan prinsip “*Jancukan*”, Blue Bird juga mengungkapkan risiko yang melekat pada instrumen keuangan, serta menjelaskan bagaimana risiko tersebut dikelola. Sebagai contoh, Laporan Tahunan 2016 PT Blue Bird mengungkapkan penjelasan bahwa dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.

“Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar... Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien, pengemudi, dan pihak ketiga lain yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Risiko kredit Grup terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain...Grup dapat terekspos terhadap risiko likuiditas apabila terjadi penghentian operasi dalam waktu yang cukup panjang sehingga tidak dapat menyelesaikan utang jangka pendek dan jangka panjang yang jatuh tempo. Grup mengurangi risiko likuiditas dengan menjaga saldo kas atau setara kas dalam jumlah yang cukup signifikan...” (PT Blue Bird, 2016:105).

Agar pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi dampak perubahan nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga terhadap risiko entitas, Blue Bird menerapkan prinsip “*Jancukan*” lebih luas, yaitu mengungkapkan hasil analisis sensitivitas pada dua hal tersebut. Blue Bird mengungkapkan:

“Pada tanggal 31 Desember 2016, jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing terapresiasi sebanyak 10% dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah sebesar Rp5.598.000.000,00 sedangkan jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing terdepresiasi sebanyak 10%, maka laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut lebih tinggi sebesar Rp5.598.000.000,00 terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi kas dan setara kas dalam mata uang asing” (PT Blue Bird, 2016:107).

Pada bagian lain laporan keuangan Blue Bird melaporkan adanya beberapa komitmen dengan pihak lain, dan memiliki kewajiban kontinjensi yang timbul karena adanya masalah litigasi (tuntutan hukum) dari pihak lain. Hal ini tertuang dalam kutipan berikut ini.

“Grup mengadakan Perjanjian Kemitraan dengan pengemudi, di mana Grup memberikan izin kepada pengemudi untuk mengoperasikan armada milik Grup. Pengemudi wajib menyerahkan uang jaminan kepada Grup, di mana uang jaminan tersebut dapat diambil apabila perjanjian kemitraan berakhir dengan masa kemitraan lebih dari satu tahun. Khusus untuk pengemudi taksi regulat dan eksekutif, wajib menyerahkan hasil operasi taksi dan akan penanggung ganti rugi atas setiap kerugian yang disebabkan” (PT Blue Bird, 2016:122).

Komitmen tidak menimbulkan hak dan kewajiban, dan karenanya, tidak dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Demikian pula, liabilitas kontinjensi tidak dapat dilaporkan dalam laporan keuangan karena kepastian keharusan untuk memenuhi kewajiban bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tertentu di masa depan. Walaupun tidak disajikan dalam laporan keuangan, Blue Bird memenuhi prinsip “Jancukan” yang diatur dalam PSAK 57 dengan cara mengungkapkan “komitmen” dan “liabilitas kontinjensi” secara naratif dalam catatan atas laporan keuangan.

Prinsip “Jancukan” juga diterapkan Blue Bird untuk memberikan informasi tentang kewajiban kontinjensi yang timbul karena adanya litigasi (tuntutan hukum). Dalam hal ini, PT Blue Bird mengungkapkan adanya permasalahan, seperti kutipan berikut ini.

“Pada tanggal 9 Desember 2016 PT Nissan Motor Distributor Indonesia selaku Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dengan register perkara No.871/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Perusahaan sebagai Tergugat. Latar belakang dan pokok permasalahan

dari gugatan ini adalah Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan MoU. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan” (PT Blue Bird, 2016:127).

Prinsip “Jancukan” yang diterapkan PT Blue Bird dalam konteks komitmen dan liabilitas Kontinjensi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengguna laporan keuangan agar dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut, sehingga laporan keuangan menjadi makin berguna bagi mereka. Meskipun tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan dalam bentuk “angka”, informasi tentang komitmen dan liabilitas kontinjensi penting untuk diungkapkan dalam bentuk narasi yang memberikan pemahaman bagi pengguna “melampaui angka”.

Dalam laporan tahunan 2016 PT Blue Bird juga menjelaskan adanya Komitmen Pembelian Tanah. Komitmen pembelian tanah tersebut belum seluruhnya terealisasi sampai dengan tahun 2016, dan karenanya, tidak dinyatakan sebagai kewajiban dalam laporan posisi keuangan. Namun, berdasarkan prinsip “Jancukan”, PT Blue Bird memberikan deskripsi secara jelas bagi pengguna laporan keuangan. Hal ini tertuang pada kutipan berikut ini.

“Pada berbagai tanggal di bulan Desember 2012 Perusahaan mengadakan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PPJB) dengan PBM dan Pemegang Saham untuk lahan seluas 133.333 meter persegi di Jakarta, Medan, Manado, dan Surabaya dengan total harga pembelian minimum sebesar Rp950.420.000.000,00. Syarat dan ketentuan sehubungan dengan perjanjian ini adalah perusahaan akan melakukan pembayaran setelah mengubah status Perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan telah selesai melaksanakan penawaran perdana saham; apabila Perusahaan, karena suatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status Perusahaan

menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir bulan Desember 2013, pihak penjual berhak membatalkan perjanjian ini; penjual berhak untuk mengubah harga yang telah disepakati berdasarkan nilai pasar yang akan dinilai terlebih dahulu. Pada tanggal 31 Desember 2016, komitmen yang telah direalisasi transaksi pembeliannya adalah untuk beberapa lokasi dengan total luas lahan masing-masing sebesar 100.931 meter persegi. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, tidak ada pembatalan atas perjanjian yang belum direalisasi pembeliannya” (PT Blue Bird, 2016:313).

Prinsip “*Jancukan*” juga diterapkan PT Blue Bird untuk memberikan informasi tentang kewajiban kontinjensi yang timbul karena adanya litigasi (tuntutan hukum). Sebagai contoh adalah litigasi hak atas tanah. PT Blue Bird mengungkapkan bahwa:

“Pada tanggal 9 September 2015 Triana mengajukan gugatan kepada Blue Bird atas tuduhan perbuatan melawan hukum dengan register perkara No. 496/Pdt.G/2015/PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan. Latar belakang dan pokok permasalahan dari gugatan ini adalah penggugat menyatakan dirinya berhak atau ikut memiliki sebagian tanah yang terletak di Jl. Kapten Muslim No. 92, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dengan Sertifikat Hak Milik No. 151/Sei Sikambing. Melalui gugatan ini, penggugat meminta Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan berhak atas sebagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 151/Sei Sikambing dan menghukum Blue Bird untuk membayar ganti rugi sebesar Rp2.113.000.000,00 dan kerugian moril sebesar Rp15.000.000.000,00 Pada tanggal 16 Juni 2016 telah dibacakan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan atas perkara tersebut, yang intinya menya-

takan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2016 salinan putusan tersebut telah diterima Blue Bird. Terhadap putusan di atas, penggugat telah menyerahkan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 6 Oktober 2016 dan Blue Bird telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 1 Desember 2016. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Medan” (PT Blue Bird, 2016:126-127).

Kepatuhan manajemen perusahaan untuk mematuhi prinsip “*Jancukan*” dalam pelaporan keuangan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bukti bahwa manajemen menyadari urgensi pengungkapan informasi yang memungkinkan meningkatkan keterbacaan dan keterpahaman laporan keuangan, sehingga laporan keuangan memiliki nilai (*value*) bagi pengguna. Hal ini konsisten dengan hasil-hasil penelitian tentang dampak keterbacaan dan keterpahaman laporan keuangan pada perilaku pengguna (Barker & McGeachin, 2013; Drago, Ginesti, Pongelli, & Sciascia, 2018; Haller & Staden, 2014; Jones & Smith, 2014; Lim, Chalmers, & Hanlon, 2018; Velte, 2018). Feng, Cummings, & Tweedie (2017) menemukan bukti bahwa *integrated reports* mengandung kompleksitas informasi, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, sehingga keterbacaan dan keterpahaman sangat diperlukan agar kebermanfaatan *integrated reports* bagi pengguna makin meningkat. Beattie & Davison (2015) menjelaskan bahwa keterbacaan dapat ditingkatkan melalui penggunaan “kata” (akun) yang mudah dimengerti, dan melalui “angka” yang diperoleh dari hasil pengukuran yang mudah dijelaskan kepada pengguna. Demikian pula dengan Davison (2015) yang juga menjelaskan bahwa keterpahaman pengguna atas *integrated reports* dapat ditingkatkan melalui pengungkapan (*disclosure*) dengan bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna pada umumnya.

Hasil penelitian serupa juga ditemukan oleh Ben-Amar & Belgacem (2018) yang melakukan analisis isi atas laporan keuangan. Velte (2018) menyatakan bahwa

deskripsi secara memadai yang diberikan oleh manajemen melalui catatan atas laporan keuangan tidak hanya membuat laporan keuangan menjadi mudah dibaca, tetapi juga dapat meningkatkan keterpahaman bagi pengguna. Bukti lain ditemukan oleh Baxamusa, Jalal, & Jha (2018), bahwa keterbacaan laporan keuangan tahunan (*annual reports*) berpengaruh positif pada keputusan para analis pasar modal, karena keterbacaan laporan keuangan merupakan *properties* dalam *earning forecast* bagi mereka. Pernyataan tersebut konsisten dengan pendapat Johansen & Plenborg (2018) yang berargumentasi bahwa laporan keuangan tidak hanya harus reliabel dan relevan bagi pengguna, tetapi juga harus mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna, karena keterbacaan dan keterpahaman merupakan cerminan dari kebermanfaatan laporan keuangan. Jones & Smith (2014) menegaskan bahwa relevansi (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*) laporan keuangan menjadi kehilangan makna jika relevansi dan reliabilitas tersebut tidak diikuti dengan keterbacaan dan keterpahaman bagi pengguna.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DSAK-IAI melalui Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) telah mengajak, menganjurkan, bahkan mewajibkan akuntan Indonesia agar berPrinsip “JANgan CUKup Angka”, “JANgan (merasa) CUKup (hanya menyajikan) Angka”, atau “JANgan CUKup (berhenti di) Angka”. DSAK-IAI menyadari bahwa keterbacaan dan keterpahaman laporan keuangan merupakan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan yang penting. Dengan terminologi “khas” masyarakat Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, prinsip yang dimaksudkan untuk meningkatkan keterbacaan dan keterpahaman laporan keuangan tersebut, dapat diucapkan secara singkat sebagai prinsip “Jancukan”. Prinsip “Jancukan” bukan hanya ditekankan oleh DSAK-IAI dalam KKPK, tetapi telah ditindaklanjuti dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). DSAK-IAI menyadari bahwa PSAK merupakan pedoman utama dalam praktik pelaporan keuangan bagi perusahaan. Dalam praktik pelaporan keuangan, prinsip “Jancukan” juga telah dipatuhi oleh perusahaan (emiten) dalam penyusunan

an Laporan Keuangan Tahunan. Emiten menyadari bahwa implementasi prinsip “Jancukan” dalam pelaporan keuangan merupakan salah upaya untuk mewujudkan transparansi dalam tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Hasil penelitian ini membawa beberapa implikasi. Pertama, implikasi praktis, bahwa keuangan berguna bagi pengguna jika relevan dan merepresentasikan fenomena ekonomis dengan tepat. Namun, relevansi (*relevance*) dan representasi tepat (*faithful representation*) tersebut menjadi kehilangan makna jika laporan keuangan tidak terpahami (*understandable*). Dalam konteks inilah catatan atas laporan keuangan menjadi penting untuk meningkatkan keterbacaan dan keterpahaman laporan keuangan bagi pengguna. Kedua, implikasi metodologi dan paradigma penelitian, bahwa dalam rangka pengembangan konsep dan praktik akuntansi, penelitian tidak hanya dapat dilakukan dengan paradigma positivisme yang menuntut keterukuran realitas serta menuntut justifikasi hasil penelitian dengan kembali pada teori-teori ekonomi dan keuangan sebagai induk teori akuntansi. Untuk mengembangkan konsep dan praktik akuntansi, penelitian dapat dilakukan berdasarkan paradigma lain, dalam hal ini adalah paradigma neo-positivisme, dan menjustifikasi hasil penelitian dengan berefleksi pada sosiologi terminologi “Jancukan” di kalangan masyarakat Kota Surabaya, Jawa Timur.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini terutama terletak pada analisis data yang dijustifikasi dengan berefleksi pada terminologi “jancuk”, yang merupakan istilah lokal masyarakat Surabaya, Jawa Timur. Karena merupakan istilah lokal, dimungkinkan istilah “jancuk” tersebut tidak dikenal oleh masyarakat secara luas, bahkan tidak dikenal dalam kamus bahasa resmi. Penelitian-penelitian dan analisis selanjutnya, khususnya penelitian yang berlandaskan pada paradigma neo-positivisme seperti penelitian ini, dapat menggunakan istilah yang lebih dikenal oleh masyarakat luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdo, H., Mangena, M., Needham, G., & Hunt, D. (2018). Disclosure of Provisions for Decommissioning Costs in Annual Reports of Oil and Gas Companies: A Content Analysis and Stakeholder Views. *Accounting Forum*, 42(4),

- 341-358. [https://doi.org/10.1016/j.
accfor.2018.10.001](https://doi.org/10.1016/j.accfor.2018.10.001)
- Abdullah, M., Evans, L., Fraser, I., & Tsala-
voutas, I. (2015). IFRS Mandatory Dis-
closures in Malaysia: The Influence of
Family Control and the Value (Ir)Rele-
vance of Compliance Levels. *Account-
ing Forum*, 39(4), 328-348. [https://doi.
org/10.1016/j.accfor.2015.05.003](https://doi.
org/10.1016/j.accfor.2015.05.003)
- Aerts, W., & Yan, B. (2017). Rhetorical Im-
pression Management in the Letter to
Shareholders and Institutional Setting.
*Accounting, Auditing & Accountability
Journal*, 30(2), 404-432. [https://doi.
org/10.1108/AAAJ-01-2015-1916](https://doi.
org/10.1108/AAAJ-01-2015-1916)
- Ajina, A., Laouiti, M., & Msolli, B. (2016).
Guiding through the Fog: Does Annu-
al Report Readability Reveal Earnings
Management? *Research in Interna-
tional Business and Finance*, 38, 509-
516. [https://doi.org/10.1016/j.rib-
af.2016.07.021](https://doi.org/10.1016/j.rib-
af.2016.07.021)
- Asay, W., Elliott, B., & Rennekamp, K. (2017)
Disclosure Readability and the Sensi-
tivity of Investors' Valuation Judgments
to Outside Information. *The Account-
ing Review*, 92(4), 1-25. [https://doi.
org/10.2308/accr-51570](https://doi.
org/10.2308/accr-51570)
- Aversano, N., Christiaens, J., & Thielen, T.
V. (2019). Does IPSAS Meet Heritage
Assets' User Needs? *International Jour-
nal of Public Administration*, 42(4), 279-
288. [https://doi.org/10.1080/019006
92.2018.1433205](https://doi.org/10.1080/019006
92.2018.1433205)
- Bacchiega, E., Bonroy, O., & Petrakis, E.
(2018). Contract Contingency in Verti-
cally Related Markets. *Journal of Eco-
nomics and Management Strategy*, 27(4),
772-791. [https://doi.org/10.1111/
jems.12252](https://doi.org/10.1111/
jems.12252)
- Barker, R., & McGeachin, A. (2013). Why is
There Inconsistency in Accounting for
Liabilities in IFRS? An Analysis of Rec-
ognition, Measurement, Estimation and
Conservatism. *Accounting and Business
Research*, 43(6), 579-604. [https://doi.
org/10.1080/00014788.2013.834811](https://doi.
org/10.1080/00014788.2013.834811)
- Baudrillard, J. (1981). *Simulacra and Simu-
lation*. Los Angeles: Semiotext(e).
- Baudrillard, J. 1983. *Simulation*. Cam-
bridge: MIT Press.
- Baxamusa, M., Jalal, A., & Jha, A. (2018).
It Pays to Partner with a Firm that Writes
Annual Reports Well. *Journal of Bank-
ing and Finance*, 92, 13-34. [https://doi.
org/10.1016/j.jbankfin.2018.04.020](https://doi.
org/10.1016/j.jbankfin.2018.04.020)
- Beattie, V., & Davison, J. (2015). Accounting
Narratives: Storytelling, Philosophis-
ing and Quantification. *Accounting and
Business Research*, 45(6-7), 655-660.
[https://doi.org/10.1080/00014788.20
15.1081520](https://doi.org/10.1080/00014788.20
15.1081520)
- Bédard, J., Brousseau, C., & Vanstraelen, A.
(2019). Investor Reaction to Auditors'
Going Concern Emphasis of Matter: Ev-
idence from a Natural Experiment. *AU-
DITING: A Journal of Practice & Theory*,
38(2), 27-55. [https://doi.org/10.2308/
ajpt-52155](https://doi.org/10.2308/
ajpt-52155)
- Ben-Amar, W., & Belgacem, I. (2018). Do So-
cially Responsible Firms Provide More
Readable Disclosures in Annual Re-
ports? *Corporate Social Responsibility
and Environmental Management*, 25(5),
1009-1018. [https://doi.org/10.1002/
csr.1517](https://doi.org/10.1002/
csr.1517)
- Biondi, L., & Lapsley, I. (2014). Accounting,
Transparency and Governance: The
Heritage Assets Problem. *Qualitative
Research in Accounting and Manage-
ment*, 11(2), 146-164. [https://doi.
org/10.1108/QRAM-04-2014-0035](https://doi.
org/10.1108/QRAM-04-2014-0035)
- Bochkay, K., Chychyla, R., Sankaragu-
ruswamy, S., & Willenborg, M. (2018).
Management Disclosures of Going Con-
cern Uncertainties: The Case of Initial
Public Offerings. *The Accounting Review*,
93(6), 29-59. [https://doi.org/10.2308/
accr-52027](https://doi.org/10.2308/
accr-52027)
- Brennan, N. M., & Merkl-Davies, D. M.
(2014). Rhetoric and Argument in So-
cial and Environmental Reporting: The
Dirty Laundry Case. *Accounting, Audit-
ing & Accountability Journal*, 27(4), 602-
633. [https://doi.org/10.1108/AAAJ-
04-2013-1333](https://doi.org/10.1108/AAAJ-
04-2013-1333)
- Brown, J. O., & Popova, V. K. (2019) How
Do Investors Respond to Disclosure of
Audit Quality Indicators? *AUDITING:
A Journal of Practice & Theory*, 38(4),
31-53. [https://doi.org/10.2308/ajpt-
52417](https://doi.org/10.2308/ajpt-
52417)
- Buccina, S., Chene, D., & Gramlich, J.
(2013). Accounting for the Environmen-
tal Impacts of Texaco's Operations in Ec-
uador: Chevron's Contingent Environ-
mental Liability Disclosures. *Accounting
Forum*, 37(2), 110-123. [https://doi.
org/10.1016/j.accfor.2013.04.003](https://doi.
org/10.1016/j.accfor.2013.04.003)
- Cen, L., Chen, F., Hou, Y., & Richardson, G.
D. (2018). Strategic Disclosures of Lit-
igation Loss Contingencies When Cus-

- tomers-Supplier Relationships Are at Risk. *The Accounting Review*, 93(2), 137-159. <https://doi.org/10.2308/accr-51869>
- Chaidali, P. P., & Jones, M. J., (2017). It's a Matter of Trust: Exploring the Perceptions of Integrated Reporting Preparers. *Critical Perspectives on Accounting*, 48, 1-20. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.08.001>
- Chakrabarty, B., Seetharaman, A., Swanson, Z., & Wang, X. (2018). Management Risk Incentives and the Readability of Corporate Disclosures. *Financial Management*, 47(3), 583-616. <https://doi.org/10.1111/fima.12202>
- Chen, F., Hou, Y., Richardson, G., & Ye, M. (2018). Auditor Experience and the Timeliness of Litigation Loss Contingency Disclosures. *Contemporary Accounting Research*, 35(2), 956-979. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12398>
- Cheung, E., & Lau, J. (2016). Readability of Notes to the Financial Statements and the Adoption of IFRS. *Australian Accounting Review*, 26(2) 162-176. <https://doi.org/10.1111/auar.12087>
- Christiaens, J., Rommel, J., Barton, A., & Everaert, P. (2012). Should All Capital Goods of Governments be Recognised as Assets in Financial Accounting? *Baltic Journal of Management*, 7(4), 429-443. <https://doi.org/10.1108/17465261211272175>
- Constable, P., & Kuasirikun, N. (2018). Gifting, Exchange and Reciprocity in Thai Annual Reports: Towards a Buddhist Relational Theory of Thai Accounting Practice. *Critical Perspectives on Accounting*, 54, 1-26. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.08.002>
- Corrigan, L., & Rixon, D. (2017). A Dramaturgical Accounting of Cooperative Performance Indicators. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 14(1), 60-80. <https://doi.org/10.1108/QRAM-08-2016-0060>
- Davison, J. (2015). Visualising Accounting: An Interdisciplinary Review and Synthesis. *Accounting and Business Research*, 45(2), 121-165. <https://doi.org/10.1080/00014788.2014.987203>
- Dong, B., Robinson, D., & Robinson, M. (2015). The Market's Response to Earnings Surprises after First-Time Going-Concern Modifications. *Advances in Accounting*, 31(1), 21-32. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2015.03.001>
- Dosinta, N., Brata, H., & Heniwati, E. (2018). Haruskah Value Creation Hanya Terbatas pada Integrated Reporting? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 248-266. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9015>
- Drago, C., Ginesti, G., Pongelli, C., & Sciascia, S. (2018). Reporting Strategies: What Makes Family Firms Beat around the Bush? Family-Related Antecedents of Annual Report Readability. *Journal of Family Business Strategy*, 9(2), 142-150. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2017.11.006>
- Edgar, V. C., Beck, M., & Brennan, N. (2018). Impression Management in Annual Report Narratives: The Case of the UK Private Finance Initiative. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(6), 1566-1592. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2016-2733>
- Elbakry, A. E., Nwachukwu, J. C., Abdou, H. A., & Elshandidy, T. (2017). Comparative Evidence on the Value Relevance of IFRS-Based Accounting Information in Germany and the UK. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 28, 10-30. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2016.12.002>
- Ellwood, S., & Greenwood, M. (2016). Accounting for Heritage Assets: Does Measuring Economic Value 'Kill the Cat'? *Critical Perspectives on Accounting*, 38, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.05.009>
- Elshandidy, T. (2014). Value Relevance of Accounting Information: Evidence from an Emerging Market. *Advances in Accounting*, 30(1), 176-186. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2014.03.007>
- Erb, C., & Pelger, C. (2015). "Twisting words"? A Study of the Construction and Reconstruction of Reliability in Financial Reporting Standard-Setting. *Accounting, Organizations and Society*, 40, 13-40. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2014.11.001>
- Evans, L. (2018). Language, Translation and Accounting: Towards a Critical Research Agenda. *Accounting, Auditing*

- & *Accountability Journal*, 31(7), 1844-1873. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2017-3055>
- Ezat, A. (2019). The Impact of Earnings Quality on the Association between Readability and Cost of Capital. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 9(3), 366-385. <https://doi.org/10.1108/JAEE-12-2018-0136>
- Fakhfakh, M. (2016). Linguistic Features and Legibility of the Consolidated Audit Reports: An Original Investigation from the Tunisian Case. *Cogent Business & Management*, 3(1), 1-29. <https://doi.org/10.1080/23311975.2016.1234360>
- Feng, T., Cummings, L., & Tweedie, D. (2017). Exploring Integrated Thinking in Integrated Reporting – An Exploratory Study in Australia. *Journal of Intellectual Capital*, 18(2), 330-353. <https://doi.org/10.1108/JIC-06-2016-0068>
- Finfgeld-Connett, D. (2014). Use of Content Analysis to Conduct Knowledge-Building and Theory-Generating Qualitative Systematic Reviews. *Qualitative Research*, 14(3), 341-352. <https://doi.org/10.1177/1468794113481790>
- Frezatti, F., Carter, D. B., & Barroso, M. F. G. (2014). Accounting Without Accounting. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 27(3), 426-464. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2012-00927>
- Ginesti, G., Sannino, G., & Drago, C. (2017). Board Connections and Management Commentary Readability: The Role of Information Sharing in Italy. *Corporate Governance*, 17(1), 30-47. <https://doi.org/10.1108/CG-01-2016-0015>
- Hall, M. (2016). Realising the Richness of Psychology Theory in Contingency-Based Management Accounting Research. *Management Accounting Research*, 31, 63-74. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2015.11.002>
- Haller, A., & Staden, C. V. (2014). The Value Added Statement – An Appropriate Instrument for Integrated Reporting. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 27(7), 1190-1216. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2013-1307>
- Havemo, E. (2018). Visual Trends in the Annual Report: The Case of Ericsson 1947-2016. *Corporate Communications: An International Journal*, 23(3), 312-325. <https://doi.org/10.1108/CCIJ-03-2017-0015>
- Jääskeläinen, A., & Luukkanen, N. (2017). The Use of Performance Measurement Information in the Work of Middle Managers. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 66(4), 479-499. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-02-2016-0043>
- Johansen, T., & Plenborg, T. (2018). Company Responses to Demands for Annual Report Changes. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(6), 1593-1617. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-02-2016-2419>
- Jones, M., & Smith, M. (2014). Traditional and Alternative Methods of Measuring the Understandability of Accounting Narratives. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 27(1), 183-208. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2013-1314>
- Karyada, I., & Irwanto, A. (2017). Kualitas Informasi Akuntansi pada Tahap Konvergensi International Financial Reporting Standard. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 308-318. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7056>
- Kumar, K., & Lim, L. (2015). Was Andersen's Audit Quality Lower than Its Peers? *Managerial Auditing Journal*, 30(8), 911-962. <https://doi.org/10.1108/MAJ-10-2014-1105>
- Kurniati, E., Asmony, T., & Santoso, B. (2017). Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu hingga Kini). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 540-558. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7072>
- Lacy, S., Watson, B. R., Riffe, D., & Lovejoy, J. (2015). Issues and Best Practices in Content Analysis. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 92(4), 791-811. <https://doi.org/10.1177/1077699015607338>
- Lee, Y. (2012). The Effect of Quarterly Report Readability on Information Efficiency of Stock Prices. *Contemporary Accounting Research*, 29(4), 1137-1170. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2011.01152>
- Leung, S., Parker, L., & Courtis, J. (2015). Impression Management through Minimal Narrative Disclosure in An-

- nual Reports. *The British Accounting Review*, 47(3), 275-289. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2015.04.002>
- Lim, E. K. Y., Chalmers, K., & Hanlon, D. (2018). The Influence of Business Strategy on Annual Report Readability. *Journal of Accounting and Public Policy*, 37(1), 65-81. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2018.01.003>
- Lopes, A., & Reis, L. (2019). Are provisions and Contingent Liabilities Priced by the Market? *Meditari Accountancy Research*, 27(2), 228-257. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2017-0212>
- Luo, J. H., Li, X., & Chen, H. (2018). Annual Report Readability and Corporate Agency Costs. *China Journal of Accounting Research*, 11(3), 187-212. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2018.04.001>
- Marshall, R., & Lennard, A. (2016). The Reporting of Income and Expense and the Choice of Measurement Bases. *Accounting Horizons*, 30(4), 499-510. <https://doi.org/10.2308/acch-51541>
- Mayew, W. J., & Sethuraman, M., & Venkatachalam, M. (2015). MD&A Disclosure and the Firm's Ability to Continue as a Going Concern. *The Accounting Review*, 90(4), 1621-1651. <https://doi.org/10.2308/accr-50983>
- Merkel-Davies, D., & Brennan, N. (2017). A Theoretical Framework of External Accounting Communication. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 30(2), 433-469. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2015-2039>
- Moreno, A., & Casasola, A. (2016). A Readability Evolution of Narratives in Annual Reports: A Longitudinal Study of Two Spanish Companies. *Journal of Business and Technical Communication*, 30(2), 202-235. <https://doi.org/10.1177/1050651915620233>
- Osgerby, J., Marriott, P., & Gee, M. (2018). Accounting Students Perceptions of Using Visual Metaphor as Part of Personal Development Planning: An Exploratory Case Study. *Accounting Education*, 27(6), 570-589. <https://doi.org/10.1080/09639284.2018.1523735>
- Palea, V. (2018). Financial Reporting for Sustainable Development: Critical Insights into IFRS Implementation in the European Union. *Accounting Forum*, 42(3), 248-260. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2018.08.001>
- Pavlopoulos, A., Magnis, C., & Iatridis, G. M. (2017). Integrated Reporting: Is it the Last Piece of the Accounting Disclosure Puzzle? *Journal of Multinational Financial Management*, 41, 23-46. <https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2017.05.001>
- Pinto, I., & Picoto, W. N. (2016). Configurational Analysis of Firms' Performance: Understanding the Role of Internet Financial Reporting. *Journal of Business Research*, 69(1), 5360-5365. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.138>
- Porter, J. C. (2019). Beyond Debits and Credits: Using Integrated Projects to Improve Students' Understanding of Financial Accounting. *Journal of Accounting Education*, 46, 53-71. <https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2018.12.002>
- PT Blue Bird. (2016). Laporan Tahunan. Tersedia pada: <http://www.bluebirdgroup.com/id/wp-content/uploads/2018/10/AR-2016-PT-Blue-Bird-e-reporting1.pdf> (Diakses 2 Januari 2019).
- PT Ciputra Surya. (2016). Laporan Tahunan. Tersedia pada: <https://www.ciputradevelopment.com/files/ctrs-annual-report-2016.pdf> (Diakses 2 Januari 2019).
- PT Martina Berto. (2016). Laporan Tahunan. Tersedia pada: http://www.martinaberto.co.id/download/AR_BERTO_2016_to_OJK.pdf (Diakses 4 Januari 2019).
- PT Total Bangun Persada. (2016). Laporan Tahunan. Tersedia pada: <http://www.totalbp.com/images/upload/annual-report/TOTL-AR2016.pdf> (Diakses 4 Januari 2019).
- Richards, G., & Staden, C. V. (2015). The Readability Impact of International Financial Reporting Standards. *Pacific Accounting Review*, 27(3), 282-303. <https://doi.org/10.1108/PAR-08-2013-0086>
- Riduwan, A., & Andayani, A. (2018). Peran Akuntansi dalam Pertanggungjawaban Sosio-Ekologi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 205-222. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9012>
- Rosenkranz, J., & Pollach, I. (2016). The Framing and Reframing of Corporate Financial Results. *Corporate Communi-*

- cations: *An International Journal*, 21(1), 103-119. <https://doi.org/10.1108/CCIJ-07-2015-0041>
- Rutherford, B. (2016)/ The Struggle to Fabricate Accounting Narrative Obfuscation. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 13(1), 57-85. <https://doi.org/10.1108/QRAM-06-2015-0060>
- Sandell, N., & Svensson, P. (2017). Writing Write-Downs: The Rhetoric of Goodwill Impairment. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 14(1), 81-102. <https://doi.org/10.1108/QRAM-04-2015-0045>
- Stone, G., & Lodhia, S. (2019). Readability of Integrated Reports: An Exploratory Global Study. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(5), 1532-1557. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2015-2275>
- Tan, H. T., Wang, E. Y., & Zhou, B. (2015). How Does Readability Influence Investors' Judgments? Consistency of Benchmark Performance Matters. *The Accounting Review*, 90(1), 371-393. <https://doi.org/10.2308/accr-50857>
- Tseng, K., Lin, C., & Yen, S. (2015). Contingencies of Intellectual Capitals and Financial Capital on Value Creation. *Journal of Intellectual Capital*, 16(1), 156-173. <https://doi.org/10.1108/JIC-04-2014-0042>
- Velte, P. (2018). Does Gender Diversity in the Audit Committee Influence Key Audit Matters' Readability in the Audit Report? UK Evidence. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 25(5), 748-755. <https://doi.org/10.1002/csr.1491>
- Wang, Z., Hsieh, T. S., & Sarkis, J. (2018). CSR Performance and the Readability of CSR Reports: Too Good to be True? *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 25(1), 66-79. <https://doi.org/10.1002/csr.1440>
- Woon, P. P., Chatterjee, B., & Cordery, C. (2019). Heritage Reporting by the Australian Public Sector. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(2), 612-631. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2015-2008>
- Xu, H., Dao, M., & Wu, J. (2018). The Effect of Real Activities Manipulation on Going Concern Audit Opinions for Financially Distressed Companies. *Review of Accounting and Finance*, 17(4), 514-539. <https://doi.org/10.1108/RAF-09-2016-0135>
- Yekini, L. S., Wisniewski, T. P., & Millo, Y. (2016). Market Reaction to the Positiveness of Annual Report Narratives. *The British Accounting Review*, 48(4), 415-430. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2015.12.001>
- Zeng, Y., Lee, E., & Zhang, L. (2016). Value Relevance of Alleged Corporate Bribery Expenditures Implied by Accounting Information. *Journal of Accounting and Public Policy*, 35(6), 592-608. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2016.06.009>